

ABSTRAK

EDO FIRDELIS GINTING

Keluarga adalah sekumpulan orang yang terikat dalam sebuah hubungan yang dimana ada kepala keluarga dan anggota keluarga, keluarga dapat diartikan sebagai unit terkecil dari masyarakat..

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”, dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Pengaturan hukum terhadap tindakan penganiayaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga dalam peraturan perundang-undangan. Kekerasan pada wanita yang dijumpai pengaturannya dalam KUHP hanya mencakup kekerasan fisik saja serta bukan mencakup kekerasan berbentuk yang lain. Pertanggungjawaban pidana atas tindakan penganiayaan yang terjadi karena kesal akibat diganggu saat tengah malam Indonesia sudah memiliki undang-undang terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sebenarnya diatur dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Pertimbangan hukum hakim atas tindakan penganiayaan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 124 K/Pid/2021. Alasan kasasi dari Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan.

Disimpulkan bahwa Realitanya, masih terdapat konsep kekerasan lain yang berdampak pada perempuan menjadi korban. Kekerasan dalam rumusan teks KUHP, dipersempit lewat definisi dari teks yang termuat pada Pasal 89 KUHP serta dipahami seolah-olah tidak terdapat lagi definisi kekerasan lain selain dibanding yang sudah disebutkan pada teks Pasal 89 KUHP tersebut. Syarat pertanggungjawaban pidana adalah kesanggupan pengusaha untuk memikul tanggung jawab, dengan kata lain pengusaha harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan. Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Penganiayaan, Suami, Isteri

ABSTRACT

EDO FIRDELIS GINTING

Family is a group of people who are bound in a relationship where there is a head of the family and family members, the family can be interpreted as the smallest unit of society.

This research is descriptive with a normative legal approach. "The normative legal approach emphasizes legal science by emphasizing secondary data, in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials", and to complete the data, relevant materials are collected and literature studies are conducted, then the data will be analyzed legally.

Legal regulations regarding acts of abuse that occur in domestic life in statutory regulations. Violence against women whose regulations are found in the Criminal Code only covers physical violence and does not include other forms of violence. Criminal liability for acts of abuse that occur due to irritation due to being disturbed in the middle of the night Indonesia already has a law against criminal acts of domestic violence, which is actually regulated by Law No. 23 of 2004 concerning the Eradication of Domestic Violence (PKDRT). The judge's legal considerations regarding acts of abuse in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 124 K / Pid / 2021. The reason for the Public Prosecutor's appeal concerns the assessment of the results of the evidence that is of an appreciation nature regarding a fact.

It is concluded that in reality, there are still other concepts of violence that have an impact on women becoming victims. Violence in the formulation of the text of the Criminal Code, is narrowed down through the definition of the text contained in Article 89 of the Criminal Code and is understood as if there are no other definitions of violence other than those already mentioned in the text of Article 89 of the Criminal Code. The requirement for criminal responsibility is the ability of the entrepreneur to bear responsibility, in other words, the entrepreneur must have the ability to be responsible. The Applicant for the Appeal cannot prove that the *Judex Facti* decision does not fulfill the provisions of Article 253 Paragraph (1) letters a, b and c of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law. Thus, based on Article 254 of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, the Public Prosecutor's appeal is rejected

Keywords: Accountability, Abuse, Husband, Wife